



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ALIMIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 492642

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 2454 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, LAINNYA Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 1495 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, WARISAN Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 1880 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, WARISAN Rp. 60.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 11.200.000

1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2012, LAINNYA Rp. 4.200.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2015, LAINNYA Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 4.900.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 57.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.083.100.000



III. HUTANG

Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.058.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.